

2022.

128. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Theodorus Yosep Parera (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/94/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 622/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022.
129. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Eko Suparno (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/95/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 623/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022.
130. Perkara TPK Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua atas nama tersangka ELTINUS OMALENG (Bupati Mimika periode 2014-2019) bersama-sama dengan tersangka MARTHEN SAWY (PPK) Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2020 tanggal 30 September 2020. Nota Dinas Nomor 626/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022.
131. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka VICTOR SITORUS (Swasta-Kontraktor). Sprin.Dik/19/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 627/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 Desember 2022.
132. Perkara TPK berupa penerimaan gratifikasi selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, atas nama tersangka ANGIN PRAYITNO AJI (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/106/DIK.00/01/12/2021, tanggal 29 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 628/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 Desember 2022.
133. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak, atas nama tersangka ANGIN PRAYITNO AJI (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/107/DIK.00/01/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 629/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 Desember 2022.

C. DIREKTORAT PENUNTUTAN

PENUNTUTAN

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) perkara, yang diantaranya merupakan perkara dengan Sprin.Juk yang terbit di tahun 2022 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) perkara, yaitu:

1. Perkara TPK secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa DADANG SUGANDA. Sprin.Dik/139/DIK.00/01/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019. Nota

Dinas Nomor 489/DIK.02.00/23/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Sprin.Juk Nomor: 89/TUT.01.00/24/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

2. Perkara TPPU menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa DADANG SUGANDA (Swasta). Sprin.Dik/54/DIK.00/01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Nota Dinas Nomor 490/DIK.02.00/23/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Sprin.Juk Nomor: 90/TUT.01.00/24/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
3. Perkara TPK bersama-sama dengan Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan kawan-kawan, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk atas nama Terdakwa YULY ARIANDI nyirih (Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya (Persero), Tbk). Sprin.Dik/164/DIK.00/01/11/2018 Tanggal 05/11/2018. Nota Dinas Nomor 556/DIK.02.00/23/11/2020 tanggal 19 November 2020. Sprin.Juk Nomor: 99/TUT.01.00/24/11/2020 tanggal 19 November 2020.
4. Perkara TPK terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Atas nama Terdakwa JAROT SUBANA (Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi Sipil/ Divisi II/ Divisi III, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/07/2020 tanggal 13 Juli 2020. Nota Dinas Nomor 558/DIK.02.00/23/11/2020 tanggal 19 November 2020. Sprin.Juk Nomor: 101/TUT.01.00/24/11/2020 tanggal 19 November 2020.
5. Perkara TPK sehubungan dengan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terdakwa TAUFIQURRAHMAN (Bupati Nganjuk periode tahun 2013 – 2018). Sprin.Dik-112/01/10/2017 tanggal 26 Okt 2017. Nota Dinas Nomor 576/DIK.02.00/23/11/2020 tanggal 26 November 2020. Sprin.Juk Nomor: 104/TUT.01.00/24/11/2020 tanggal 26 November 2020.
6. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama Terdakwa TAUFIQURRAHMAN (Bupati Kabupaten Nganjuk). Sprin.Dik-121/01/12/2017 tanggal 27 Desember 2017. Nota Dinas Nomor 577/DIK.02.00/23/11/2020 tanggal 26 November 2020. Sprin.Juk Nomor: 105/TUT.01.00/24/11/2020 tanggal 26 November 2020.
7. Perkara TPK pada kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sumber dana APBD TA. 2013 atas nama Terdakwa JOHAN ANUAR (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2009 – 2014). Sprin.Dik/61/DIK.00/01/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 646/DIK.02.00/23/12/2020 tanggal 10 Desember 2020. Sprin.Juk Nomor: 111/TUT.01.00/24/12/2020 tanggal 10 Desember 2020.

8. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa HADINOTO SOEDIGNO selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2007-2012 yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. dan kawan-kawan, terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sprin.Dik/79/DIK.00/01/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 712/DIK.02.00/23/12/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sprin.Juk Nomor: 114/TUT.01.00/24/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
9. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa HADINOTO SOEDIGNO (Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2007-2012) yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo (Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd.) dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sprin.Dik/71/DIK.00/01/11/2020, tanggal 20 November 2020. Nota Dinas Nomor 713/DIK.02.00/23/12/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sprin.Juk Nomor: 115/TUT.01.00/24/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
10. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI dan penerimaan gratifikasi atas nama Terdakwa ROHADI (Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan PN Bekasi). Sprin.Dik-56/01/08/2016. Nota Dinas Nomor 13/DIK.02.00/23/01/2021 tanggal 7 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor 01/TUT.01.00/24/01/2020 tanggal 7 Januari 2021.
11. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama Terdakwa ROHADI (Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan PN Bekasi). Sprin.Dik-57/01/08/2016. Nota Dinas Nomor 14/DIK.02.00/23/01/2021 tanggal 7 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor 02/TUT.01.00/24/01/2021 tanggal 7 Januari 2021.
12. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BUDIMAN SALEH (BUMN - Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia) yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Terdakwa Budi Santoso (BUMN - Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia) dan Terdakwa Irzal Rinaldi Zailani (BUMN - Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia) dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017. Sprin.Dik/26/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 177/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 1 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 24/TUT.01.00/24/03/2020 tanggal 1 Maret 2021.
13. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa FERRY SANTOSA S. selaku Mitra Penjualan PT. Dirgantara Indonesia, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Terdakwa Budi Santoso selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Terdakwa Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dan kawan-

kawan dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017. Sprin.Dik/29/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 189/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 25/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 2 Maret 2021.

14. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ARIE WIBOWO (BUMN - Direktur Produksi PT. Dirgantara Indonesia), yang secara bersama- sama atau turut serta dengan Terdakwa Budi Santoso (BUMN - Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia) dan Terdakwa Irzal Rinaldi Zailani (BUMN - Kepala Divisi Penjualan PT, Dirgantara Indonesia) dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017. Sprin.Dik/27/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 188/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 26/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 2 Maret 2021.
15. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa DIDI LAKSAMANA (Swasta - Mitra Penjualan PT. Dirgantara Indonesia), yang secara bersama- sama atau turut serta dengan Terdakwa Budi Santoso selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Terdakwa Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dan kawan-kawan dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017. Sprin.Dik/28/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 201/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 5 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 8 Maret 2021.
16. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Yaya Purnomo selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai atas nama Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH (Walikota Dumai periode tahun 2016-2021). Sprin.Dik/35/DIK.00/01/04/2019 tanggal 22 April 2019. Nota Dinas Nomor 221/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 28/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 15 Maret 2021.
17. Perkara TPK menerima hadiah atau janji atas nama Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH (Walikota Dumai periode tahun 2016-2021). Sprin.Dik/36/DIK.00/01/04/2019 tanggal 22 April 2019. Nota Dinas Nomor 222/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 29/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 15 Maret 2021.
18. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa EDHY PRABOWO (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia), terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dari Suharjito dan kawan-kawan. Sprin.Dik/73/DIK.00/01/11/2020, tanggal 25 November 2020. Nota Dinas Nomor 257/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 24 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 31/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 24 Maret 2021.
19. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek dan penerbitan perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA (Wali Kota Cimahi periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022). Sprin.Dik/76/DIK.00/01/11/2020, tanggal 28 November 2020. Nota Dinas Nomor 258/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 33/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 25 Maret 2021.
20. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019 an. Terdakwa ABDUL ROZAQ MUSLIM (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019). Sprin.Dik/53/DIK.00/01/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Nota Dinas Nomor 259/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor

34/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 25 Maret 2021.

21. Perkara TPK penyelenggara negara (Drs. Wenny Bukamo (Bupati Banggai Laut 2016-2021)) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa RECKY SUHARTONO GODIMAN (Komisaris Utama PT ABG (Alfa Berdikari Group) - Swasta). Sprin.Dik/85/DIK.00/01/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Nota Dinas Nomor 293/DIK.02.00/23/04/2021 tanggal 1 April 2021. Sprin.Juk Nomor : 39/TUT.01.00/24/04/2021 tanggal 1 April 2021.
22. Perkara TPK yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa Nurhadi, bersama sama dengan Rezky Herbiyono terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terdakwa FERDY YUMAN (Wiraswasta). Sprin.Dik/01/DIK.00/01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor : 45/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 07 Mei 2021.
23. Perkara TPK terkait dengan setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 atas nama Terdakwa PRIYADI KARDONO (Kepala BIG 2014-2016). Sprin.Dik/55/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 376/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor: 46/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021.
24. Perkara TPK terkait dengan setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 atas nama Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS (Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)). Sprin.Dik/56/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 377/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor : 47/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021.
25. Perkara TPK terkait dengan setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 atas nama Terdakwa LISSA RUKMI UTARI (Komisaris Utama PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan Direktur Utama PT WAINDO SPECTERRA INDONESIA - Swasta). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 378/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor : 48/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021.
26. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara

- negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019 terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Terdakwa SAMIN TAN (Pemilik PT Borneo Lumbang Energi & Metal). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2019 Tanggal 01 Februari 2019. Sprin.Juk Nomor : 49/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 03 Juni 2021.
27. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama Terdakwa HANDOKO SETIONO (Swasta – Komisaris PT. Arta Niaga Nusantara). Sprin.Dik/10/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 389/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 50/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 04 Juni 2021.
28. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama Terdakwa MELIA BOENTARAN (Swasta – Direktur PT. Arta Niaga Nusantara). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 390/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 51/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 04 Juni 2021.
29. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa JUARSAH (Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020). Sprin.Dik/02/DIK.00/01/01/2021 tanggal 20 Januari 2021. Nota Dinas Nomor 399/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 14 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 52/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 14 Juni 2021.
30. Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM) dari China sebagai penyedia barang atas nama Terdakwa R.J. LINO (Dirut PT. Pelindo II) dkk. Sprin.Dik-55/01/12/2015. Nota Dinas Nomor 443/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 19 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 56/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 19 Juli 2021.
31. Perkara TPK atas nama Terdakwa M. TOTOH GUNAWAN (Swasta - PT. Jagat Dir Gantara dan CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang) bersama-sama Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 dan Andri Wibawa, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya terkait Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dan atau melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sprin.Dik/19/DIK.00/01/02/2021, tanggal 26 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 460/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 27 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 61/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 29 Juli 2021.
32. Perkara TPK atas nama Terdakwa AA UMBARA SUTISNA (Bupati Bandung Barat periode 2018-2023) dan kawan-kawan, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya terkait pengadaan barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dan

- atau melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi serta menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2020, tanggal 26 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 463/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 62/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
33. Perkara TPK atas nama Terdakwa ANDRI WIBAWA (Swasta) bersama-sama Aa Umbara Sut Isna selaku Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 dan M. Totoh Gunawan selaku pemilik PT. Jagat Dir Gantara dan CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya terkait Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dan atau melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sprin.Dik/18/DIK.00/01/02/2021, tanggal 26 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 464/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 63/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
34. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 atas nama Terdakwa ADE BARKAH SURAHMAN. (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s.d. 2019 serta Periode tahun 2019 s.d 2024). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/02/2021, tanggal 22 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 475/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 64/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
35. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Baral kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 atas nama terdakwa SITI AISYAH TUTI HANDAYANI (Anggota DPRD Provinsi Jawa Baral Periode 2014 s.d. 2019). Sprin.Dik/12/DIK.00/01/02/2021, tanggal 22 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 474/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor : 65/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
36. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas atau Pemberian Perizinan keluar Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Sukamiskin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA als WAWAN (Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Sukamiskin). Sprin.Dik/96/DIK.00/01/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 486/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 66/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
37. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari M Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan M. Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai dan penerimaan lainnya atas nama Terdakwa STEPANUS ROBIN PATTUJU (Penyidik KPK). Sprin.Dik/29/DIK.00/01/04/2021, tanggal 22 April 2021. Nota Dinas Nomor 484/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor Nomor : 67/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
38. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari M Syahrial selaku Walikota Tarjujung Balai periode 2016-2021 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan M. Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai dan penerimaan lainnya atas nama Terdakwa MASKUR HUSAIN (Pengacara). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/04/2021, tanggal 22 April 2021. Nota Dinas Nomor 485/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor:

68/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021.

39. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 oleh Terdakwa SRI WAHYUMI MARIA MANALIP (Bupati Talaud periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/11/2020, tanggal 4 November 2020. Nota Dinas Nomor 494/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor : 69/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021.
40. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Bank Pan Indonesia, Tbk tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/03/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 501/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 70/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
41. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa DADAN RAMDANI (Kepala Subdirektorat Kelinoasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/02/2021, tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 531/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 13 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 71/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 13 September 2021.
42. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 atas nama Terdakwa KI AGUS EMIL FAHMY CORNAIN (Pemilik PT. Ayodya Multi Sarana - Swasta). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 556/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 16 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 72/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 16 September 2021.
43. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 atas nama Terdakwa SOLIHAN (Direktur Keuangan dan Investasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 – 2016). Sprin.Dik/60/DIK.00/01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 557/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 16 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 73/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 16 September 2021.
44. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terdakwa YOORY CORNELES (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di

- Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/13/DIK.00/01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 586/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 23 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 74/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 23 September 2021.
45. Perkara TPK Terdakwa EDDY RUMPOKO (Walikota Batu periode 2011 s.d 2017) yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/79/DIK.00/01/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Nota Dinas Nomor 588/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 28 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 75/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 30 September 2021.
 46. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa PAUT SYAKARIN (Swasta). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 605/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 76/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021.
 47. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terdakwa ANJA RUNTUWENE (Direktur PT Adonara Propertindo) bersama-sama dengan Tommy Adrian, Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/14/DIK.00/01/02/2020, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 77/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
 48. Perkara TPK atas nama Terdakwa RUDY HARTONO ISKANDAR (Swasta) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, kota Jakarta Timur, Provinsi OKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/33/DIK.00/01/05/2021, tanggal 28 Mei 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 78/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
 49. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terdakwa TOMMY ADRIAN (Direktur PT Adonara Propertindo) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/15/DIK.00/01/02/2020, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 79/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
 50. Perkara TPK bersama-sama dengan Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 atas nama Terdakwa PT. ADONARA PROPERTINDO (Korporasi). Sprin.Dik/16/DIK.00/01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 80/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021.
 51. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa FAHRURROZI, ARRAKHMAT EKA PUTRA, WIWID

- ISWHARA dan ZAINUL ARFAN (masing-masing anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 619/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 81/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021.
52. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa YUSMADA (Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai) terkait lelang / mutasi jabatan di Pemerintah kota Tanjungbalai Tahun 2019 kepada M. Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai periode 2016 s.d. 2021. Sprin.Dik/27/DIK.00/01/04/2021, tanggal 15 April 2021. Nota Dinas Nomor 635/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 82/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
53. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kepada Doody Kurniawan bersama -sama dengan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018- 2023 dan Hasan Aminuddin atas nama Terdakwa SUMARTO (PNS). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 645/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 83/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
54. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018-2023 melalui Hasan Aminuddin dan Doody Kurniawan atas nama Terdakwa ALI WAFI, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, NURUL HADI (masing-masing ASN Pemkab Probolinggo). Sprin.Dik/49/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 644/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 84/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
55. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018-2023 melalui Hasan Aminuddin dan Muhamad Ridwan atas nama Terdakwa NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO, SAMSUDDIN (masing-masing ASN Pemkab Probolinggo). Sprin.Dik/50/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 643/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 85/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
56. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama Terdakwa MARHAINI (Direktur CV Hanamas – Swasta). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 661/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 12 November 2021. Sprin.Juk Nomor : 86/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 12 November 2021.
57. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama Terdakwa FACHRIADI (Direktur CV Kalpataru – swasta). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 661/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 12 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 87/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 12 November 2021.
58. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 atas nama Terdakwa H.M. ANZARULLAH (Kepala BPBD Kabupaten Kolaka Timur). Sprin.Dik/71/DIK.00/01/09/2021, tanggal 22 September 2021. Nota Dinas Nomor 672/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 19 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 88/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 19 November 2021.

59. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah atas nama Terdakwa MUHAMMAD AZIS SYAMSUDDIN (Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/09/2021, tanggal 2 September 2021. Nota Dinas Nomor 673/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 22 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 89/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 22 November 2021.
60. Perkara TPPU yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA (Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019). Sprin.Dik-13/DIK.00/01/01/2018 Tanggal 19 Januari 2018. Nota Dinas Nomor 693/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 26 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 90/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 26 November 2021.
61. Perkara TPK atas nama Terdakwa AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA (PNS) bersama-sama Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014 - 2019 dan SYAHBUDIN (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara) yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/25/DIK.00/01/04/2021, tanggal 13 April 2021. Nota Dinas Nomor 708/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 91/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021.
62. Perkara TPK pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s.d. 2018 atas nama Terdakwa APRI SUJADI (Bupati Bintan Ex Officio Wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/02/2021, tanggal 17 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 705/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Nomor: 92/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021.
63. Perkara TPK pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s.d. 2018 atas nama Terdakwa MOHD. SALEH H. UMAR (Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan). Sprin.Dik/10/DIK.00/01/02/2021, tanggal 17 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 706/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 93/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021.
64. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 atas nama Terdakwa SUHANDY (Direktur PT Selaras Simpati Nusantara/ swasta). Sprin.Dik/76/DIK.00/01/10/2021, tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 715/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 94/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 14 Desember 2021.
65. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018-2023 dan Hasan Aminuddin, terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 atas nama Terdakwa DODDY KURNIAWAN (PNS). Sprin.Dik/46/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 703/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 8 Desember 2021.

Sprin.Juk Nomor: 95/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 17 Desember 2021.

66. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji bersama-sama dengan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018-2023 dan Hasan Aminuddin, terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 atas nama Terdakwa MUHAMAD RIDWAN (PNS). Sprin.Dik/47/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 722/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 17 Desember 2021.
67. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan Persetujuan Penempatan Pembangunan Kebun Kemitraan dalam rangka perpanjangan Hak Guna Usaha perkebunan PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 atas nama Terdakwa SUDARSO (General Manager PT Adimulya Agro Lestari/ swasta). Sprin.Dik/78/DIK.00/01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 720/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 17 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 97/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 17 Desember 2021.
68. Perkara TPK bersama-sama Ir. Zaenal Abidin, MM, MT, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA (Bupati Mojokerto periode Tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2021). Sprin.Dik/70/DIK.00/01/04/2018 Tanggal 18/04/2018. Nota Dinas Nomor 759/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 23 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 98/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 23 Desember 2021.
69. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan atas nama Terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA (Bupati Mojokerto periode Tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2021). Sprin.Dik/142/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 05/10/2018. Nota Dinas Nomor 760/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 23 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 99/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 23 Desember 2021.
70. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa ISHAK JOHARSYAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 775/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 100/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
71. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa MARSITO (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/61/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 777/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 101/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
72. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di

Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa MUHARDI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/62/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 778/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 102/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.

73. Perkara TPK bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa AHMAD REO KOSUMA (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/55/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 771/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 103/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
74. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa ARI YOCA SETIADI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/56/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 772/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 104/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
75. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa FITRIANZAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 773/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 105/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
76. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa INDRA GANI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 774/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 106/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
77. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa MARDIANSYAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/60/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 776/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor:

- 107/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
78. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa PIARDI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/63/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 780/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 108/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
79. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa SUBAHAN (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/64/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 779/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 109/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.
80. Perkara TPK yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terdakwa PUPUT TANTRIANA SARI (Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan periode 2018-2023) bersama-sama dengan Terdakwa HASAN AMINUDDIN (Anggota DPR RI). Sprin.Dik/69/DIK.00/01/09/2021, tanggal 17 September 2021. Nota Dinas Nomor 783/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 28 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 110/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.
81. Perkara TPK bersama-sama dengan IR. Djoko Saputro selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dkk terkait pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017 atas nama Terdakwa ANDRIRINI YAKTININGSASI (Swasta). Sprin.Dik/173/DIK.00/01/11/2018 Tanggal 28/11/2018. Nota Dinas Nomor 787/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 111/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.
82. Perkara TPK yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO (Direktur Produksi PTPN XI Dkk). Sprin.Dik/91/DIK.00/01/12/2020, tanggal 10 Desember 2020. Nota Dinas Nomor 785/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 112/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.
83. Perkara TPK yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016 atas nama Terdakwa ARIF HENDRAWAN (Direktur PT Wahyu Daya Mandiri/ peg BUMN). Sprin.Dik/72/DIK.00/01/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 786/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 113/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.
84. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama Terdakwa DIDDIET HADIANTO (Swasta-Project Manager PT. WIKAWATI). Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 796/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 114/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.

85. Perkara TPK Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis(Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 atas nama Terdakwa FIRJAN TAUFAN (Swasta-Staf Pemasaran PT WIKA). Sprin.Dik/14/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 797/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 115/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.
86. Perkara TPK Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TIRTHA ADHI KAZMI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 798/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 116/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.
87. Perkara TPK pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kasawan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 s.d. TA 2011 atas nama Terdakwa PT. TUAH SEJATI (Korporasi). Sprin.Dik/31/DIK.00/01/02/2018 Tgl. 19 Februari 2018. Nota Dinas Nomor 789/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 117/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.
88. Perkara TPK pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kasawan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 s.d. TA 2011 atas nama Terdakwa PT. NINDYA KARYA (persero) (Korporasi). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/02/2018 Tgl. 19 Februari 2018. Nota Dinas Nomor 790/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 118/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.
89. Perkara TPK suatu korporasi yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P TA 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI, atas nama Terdakwa PT. MERIAL ESA (korporasi). Sprin.Dik/169/DIK.00/01/11/2018 Tanggal 23/11/2018. Nota Dinas Nomor 792/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 119/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.
90. Perkara TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 yang pada saat dilakukan perbuatan untuk dan seluruh atau sebagiannya di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya serta penerimaan gratifikasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2018 atas nama Terdakwa BUDHI SARWONO (Walikota Banjarnegara) dan Terdakwa KEDY AFANDI (Wiraswasta). Sprin.Dik/32/DIK.00/01/05/2021, tanggal 25 Mei 2021. Nota Dinas Nomor 793/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 121/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.
91. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 atas nama Terdakwa ANDI MERYA (Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026). Sprin.Dik/70/DIK.00/01/09/2021, tanggal 22 September 2021. Nota Dinas Nomor 791/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 122/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.
92. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan

perpajakan PT BANK PAN INDONESIA Tbk tahun pajak 2016, dan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa WAWAN RIDWAN (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/82/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021. Nota Dinas Nomor 881/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 123/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.

93. Perkara TPK berupa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terdakwa WAWAN RIDWAN (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/84/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021. Nota Dinas Nomor 882/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 124/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
94. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan; pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa WAWAN RIDWAN (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/85/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021. Nota Dinas Nomor 883/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 125/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Januari

95. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama tersangka MALIKI (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Hulu Sungai Utara). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 12/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 02/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.
96. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Bank Pan Indonesia Tbk tahun pajak 2016, dan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama tersangka ALFRED SIMANJUNTAK (Ketua Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/83/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021. Nota Dinas Nomor 22/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 14 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 03/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 14 Januari 2022.
97. Perkara TPK Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka PETRUS EDY SUSANTO (Swasta – Kontraktor). Sprin.Dik/15/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 23/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 17 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 04/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 17 Januari 2022.

98. Perkara TPK Proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka I KETUT SUARBAWA (Pegawai BUMN - Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk). Sprin.Dik/16/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 24/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 17 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 05/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 17 Januari 2022.
99. Perkara TPK dalam kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi; Kegiatan Sepeda Sehat Dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi; dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka SRI UTAMI (Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM). Sprin.Dik-23/01/03/2017 Tanggal 31 Maret 2017. Nota Dinas Nomor 67/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 06/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 28 Januari 2022.
100. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji atas nama Tersangka M. SYAHRIAL (Walikota Tanjungbalai periode 2016 s.d. 2021) terkait lelang / mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dari Yusmada. Sprin.Dik/28/DIK.00/01/04/2021, tanggal 15 April 2021. Nota Dinas Nomor 68/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 31 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 07/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Februari

101. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 atas nama tersangka DODI REZA ALEX NOERDIN (Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022). Sprin.Dik/73/DIK.00/01/10/2021, tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 79/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 08/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 11 Februari 2022.
102. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 atas nama tersangka EDDY UMARI (Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin). Sprin.Dik/74/DIK.00/01/10/2021, tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 81/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 09/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 11 Februari 2022.
103. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 atas nama tersangka HERMAN MAYORI (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin). Sprin.Dik/75/DIK.00/01/10/2021, tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 80/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 10/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 11 Februari 2022.
104. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan Persetujuan Penempatan Pembangunan Kebun Kemitraan dalam rangka perpanjangan Hak Guna Usaha perkebunan PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 atas nama tersangka ANDI PUTRA (Bupati Kuantan Singingi). Sprin.Dik/77/DIK.00/01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 84/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 15 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 11/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 15 Februari 2022.
105. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada DR. dr. Herman Sutrisno, MM selaku Walikota Banjar periode 2008-2013, terkait proyek pada Dinas PUPR Kota Banjar atas nama tersangka RAHMAT WARDI (Swasta). Sprin.Dik/42/DIK.00/01/06/2020 tanggal 30 Juni 2020. Nota Dinas Nomor 87/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 17 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 12/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 18 Februari 2022.

Maret

106. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka APIF FIRMANSYAH (Mantan Asisten Pribadi Zumi Zola). Sprin.Dik/34/DIK.00/01/06/2021, tanggal 18 Juni 2021. Nota Dinas Nomor 98/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 1 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 13/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 01 Maret 2022.
107. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya atas nama tersangka APIF FIRMANSYAH (Mantan Asisten Pribadi Zumi Zola). Sprin.Dik/35/DIK.00/01/06/2021, tanggal 18 Juni 2021. Nota Dinas Nomor 99/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 1 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 14/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 01 Maret 2022.
108. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka ALI AMRIL (Direktur PT MAM Energindo – Swasta). Sprin.Dik/03/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 105/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 15/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022.
109. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka MAKHFUD SAIFUDIN (Camat Rawalumbu - Bekasi). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 108/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 16/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022.
110. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka LAI BUI MIN (Swasta). Sprin.Dik/01/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 106/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 17/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022.
111. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka SURYADI MULYA (Direktur PT Kota Binrang Rayatri – Swasta). Sprin.Dik/02/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 107/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 18/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022.
112. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DONO PURWOKO (kativ adhi karya BUMN). Sprin.Dik/135/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor 111/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 9 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 19/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 09 Maret 2022.
113. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, atas nama tersangka ACHMAD ZUHDI (Swasta). Sprin.Dik/12/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13

Januari 2022. Nota Dinas Nomor 114/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 11 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 20/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 11 Maret 2022.

114. Perkara TPK dalam proyek pengadaan barang dan/ jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 serta penerimaan lainnya atas nama tersangka ABDUL WAHID (Bupati Hulu Sungai Utara periode 2017 s.d 2022). Sprin.Dik/86/DIK.00/01/11/2021, tanggal 11 November 2021. Nota Dinas Nomor 122/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 17 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 21/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 17 Maret 2022.
115. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan; pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka ABDUL WAHID (Bupati Hulu Sungai Utara periode 2017 s.d 2022). Sprin.Dik/105/DIK.00/01/12/2021, tanggal 22 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 123/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 17 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 22/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 17 Maret 2022.
116. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama tersangka MUARA PERANGIN ANGIN (Swasta). Sprin.Dik/21/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 125/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 18 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 23/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 18 Maret 2022.

April

117. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Agus Firmansyah (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/87/DIK.00/01/11/2021, tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 167/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 24/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
118. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Mardalena (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/95/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 162/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 25/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
119. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Misran (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/96/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 161/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 26/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.

120. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Ahmad Fauzi (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/88/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 153/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022
121. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Verra Erika (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/100/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 165/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 28/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
122. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Willian Husin (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/99/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 166/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 29/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
123. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Daraini (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/89/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 155/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 30/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
124. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Eksa Hariawan (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/90/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 156/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 31/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.

125. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Elizon (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Nota Dinas Nomor 157/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 32/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
126. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Irul (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/94/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 163/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 33/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
127. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Hendly (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/93/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 154/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor : 34/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
128. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Faizal Anwar (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/92/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 158/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 35/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
129. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Samudera Kelana (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Nota Dinas Nomor 160/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 36/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
130. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Tjik Melan (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Nota Dinas Nomor 159/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 37/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.

131. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Umam Pajri (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/99/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 164/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 38/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022.
132. Perkara TPK berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada ANGIN PRAYITNO AJI, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama-sama dengan DADAN RAMDANI selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Tersangka AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak dan kawan-kawan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Tahun Pajak 2016. Sprin.Dik/05/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 172/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 14 April 2022. Sprin.Juk Nomor 39/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 14 April 2022.
133. Perkara TPK berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama-sama dengan DADAN RAMDANI selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Tersangka RYAN AHMAD RONAS selaku konsultan pajak dan kawan-kawan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Tahun Pajak 2016. Sprin.Dik/06/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 173/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 14 April 2022. Sprin.Juk Nomor 40/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 14 April 2022.
134. Perkara TPK sehubungan dengan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan RAPBD.P Tahun 2014 dan atau RAPBD.P Tahun 2015 pada Provinsi Riau atas nama tersangka ANNAS MAAMUN (Gubernur Riau). Sprin.Dik-01/01/01/2015. Nota Dinas Nomor 175/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 18 April 2022. Sprin.Juk Nomor 41/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 18 April 2022.
135. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada DR. dr. Herman Sutrisno, MM selaku Walikota Banjar periode 2008-2013, terkait proyek pada Dinas PUPR Kota Banjar atas nama tersangka RAHMAT WARDI (Swasta). Sprin.Dik/42/DIK.00/01/06/2020 tanggal 30 Juni 2020. Nota Dinas Nomor 87/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 17 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 42/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 20 April 2022.
136. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan lahan tahun 2021, proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama tahun 2021 dan pengisian tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, meminta dan menerima pembayaran dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan penerimaan lain terkait jabatannya atas nama tersangka Rahmat Effendi (Walikota Bekasi periode tahun 2018 s.d. tahun 2023). Sprin.Dik/05/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 203/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 43/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022.
137. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan lahan tahun 2021, proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama tahun 2021 dan pengisian tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, meminta dan menerima pembayaran dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan penerimaan lain terkait jabatannya atas nama

tersangka Muhamad Bunyamin (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP). Sprin.Dik/06/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 204/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 44/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022.

138. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan lahan tahun 2021, proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama tahun 2021 dan pengisian tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, meminta dan menerima pembayaran dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan penerimaan lain terkait jabatannya atas nama tersangka Mulyadi alias Bayong (Lurah Jati Sari-Bekasi). Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 205/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 45/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022.
139. Perkara TPK menerima hadiah atau janji Terkait pengadaan lahan di wilayah Kota Bekasi Tahun 2021 atas nama tersangka Jumhana Luthfi Amin (Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi). Sprin.Dik/08/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 206/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 46/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022.
140. Perkara TPK menerima hadiah atau janji Terkait pengadaan lahan di wilayah Kota Bekasi Tahun 2021 atas nama tersangka Wahyudin (Camat Jatisampurna-Bekasi). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 207/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 47/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022.
141. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka IVANA KWELJU, yaitu rnernberi hadiah atau janji terkait terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kola Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 bersama-sama JOHNY RYNHARD KASMAN. Sprin.Dik/43/DIK.00/01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 202/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 48/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022.

Mei

142. Perkara TPK yang dilakukan oleh Tersangka TIGOR PRAKASA yaitu memberi hadiah atau janji kepada SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung peri ode 2013-2018 dan kawan-kawan, terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung. Sprin.Dik/26/DIK.00/01/04/2021 tanggal 13 April 2021. Nota Dinas Nomor 212/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 9 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 49/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 09 Mei 2022.
143. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka ADI WIBOWO (Kadiv Waskita Karya BUMN). Sprin.Dik/133/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor 220/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 50/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022.
144. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Abdul Gafur Mas'ud (Bupati Penajam Paser Utara peri ode 2018 s.d. 2023). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022. Nota Dinas Nomor 231/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 51/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022.
145. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau

janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama tersangka Muliadi (Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/14/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 232/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 52/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022.

146. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama tersangka Edi Hasmoro (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/15/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 228/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 53/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022.
147. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama tersangka Jusman (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/16/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 229/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 54/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022.
148. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama tersangka Nur Afifah Balgis (Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 230/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 55/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022.
149. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama tersangka Isfi Syahfitra (Wiraswasta). Sprin.Dik/22/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 238/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 56/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022.
150. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama tersangka Shuhanda Citra (Wiraswasta). Sprin.Dik/23/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 239/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 57/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022.

151. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama tersangka Marcos Surya Abdi (Wiraswasta). Sprin.Dik/24/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 240/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 58/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022.
152. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah tau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama tersangka Terbit Rencana Perangin Angin (Bupati Kab. Langkat Periode 2019-2024) dan Iskandar Perangin Angin (Wiraswasta (Kepala Desa Balai Kasih-Langkat). Sprin.Dik/25/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 243/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 59/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022
153. Perkara TPK bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama tersangka Itong Isnaini Hidayat (Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya). Sprin.Dik/28/DIK.00/01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 247/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 60/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022.
154. Perkara TPK setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Tindak pidana terkait dengan Permohonon Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama tersangka RM Hendro Kasiono (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/26/DIK.00/01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 246/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 61/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022.
155. Perkara TPK bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama tersangka M Hamdan (PNS (Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya)). Sprin.Dik/27/DIK.00/01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 248/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 62/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022.
156. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara terkait Pengurusan Dana Insentif Daerah {DID) Kabupaten Tabanan Tahun 2018 atas nama tersangka Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan Periode 2016 s.d 2021). Sprin.Dik/79/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 249/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 63/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 20 Mei 2022.
157. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau

Penyelenggaraan Negara terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun 2018 atas nama tersangka I Dewa Nyoman Wiratmaja (Dosen Universitas Udayana). Sprin.Dik/80/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 250/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 64/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 20 Mei 2022.

158. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama tersangka Laode M Syukur (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna). Sprin.Dik/102/DIK.00/01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 253/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 23 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 65/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 23 Mei 2022.
159. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka OHNY RYNHARD KASMAN bersama-sama TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021, yaitu menerima hadiah atau janji terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kola Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dari IVANA KWELJU dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabalannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka Johny Rynhard Kasman (swasta). Sprin.Dik/42/DIK.00/01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 256/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 25 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 66/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 25 Mei 2022.
160. Perkara TPK yang dilakukan oleh TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 bersama-sama JOHNY RYNHARD KASMAN, yaitu menerima hadiah atau janji terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dari IVANA KWELJU dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/41/DIK.00/01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 255/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 25 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 67/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 25 Mei 2022.
161. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama tersangka Moch Ardian Noervianto (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri periode Juli 2020 sampai dengan November 2021). Sprin.Dik/102/DIK.00/01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 266/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 68/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Juni

162. Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka ISNU EDHI WIJAYA selaku Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan. Sprin.Dik/83/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 267/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 69/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 02 Juni 2022.
163. Perkara TPK dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka HUSNI FAHMI selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi dalam rangka penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

Nasional (KTP Elektronik) bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan. Sprin.Dik/84/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 268/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 70/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 02 Juni 2022.

164. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang diduga dilakukan oleh Tersangka ADE YASIN selaku Bupati Bogor periode 2018-2023 dan kawan-kawan. Sprin.Dik/37/DIK.00/01/04/2022 tanggal 27 April 2022. Nota Dinas Nomor 305/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 24 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 71/TUT.01.00/24/06/2022 tanggal 24 Juni 2022.
165. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang diduga dilakukan oleh Tersangka MAULANA ADAM, RIZKI TAUFIK HIDAYAT dan IHSAN AYATULLAH bersama sama dengan ADE YASIN selaku Bupati Bogor periode 2018-2023 atas nama tersangka Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizki Taufik Hidayat (PNS Kab. Bogor). Sprin.Dik/38/DIK.00/01/04/2022 tanggal 27 April 2022. Nota Dinas Nomor 306/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 24 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 72/TUT.01.00/24/06/2022 tanggal 24 Juni 2022.

Juli

-

Agustus

166. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Oon Nursihono (Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung, Tbk). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 330/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 73/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
167. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka Ardius Prihantono (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)). Sprin.Dik/36/DIK.00/01/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 355/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 74/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
168. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka Agus Kartono (Penerima Kuasa Menjual Tanah). Sprin.Dik/37/DIK.00/01/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 356/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022. Sprin.Juk

Nomor 75/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022.

169. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 atas nama tersangka Farid Nurdiansyah (Perantara/Swasta). Sprin.Dik/38/DIK.00/01/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 357/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 76/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
170. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama tersangka Dandan Jaya Kartika (Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Walikota Jogjakarta). Sprin.Dik/52/DIK.00/01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 363/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 77/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
171. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang diduga dilakukan oleh Tersangka ANTHON MERDIANSYAH bersama sama dengan ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH selaku Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Sprin.Dik/39/DIK.00/01/04/2022 tanggal 27 April 2022. Nota Dinas Nomor 370/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 78/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
172. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 atas nama tersangka Hj. ANDI MERYA, SIP (Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026). Sprin.Dik/70/DIK.00/01/09/2021 tanggal 22 September 2021. Nota Dinas Nomor 382/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 79/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
173. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama tersangka LM Rusdiyanto Emba (Wiraswasta). Sprin.Dik/54/DIK.00/01/06/2022 tanggal 6 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 383/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 80/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
174. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama tersangka Sukarman Loke (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna). Sprin.Dik/55/DIK.00/01/06/2022 tanggal 6 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 384/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 81/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

September

175. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka RICHARD LOUHENAPESY selaku Wali Kota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022 bersama-sama ANDREW ERIN HEHANUSSA, yaitu menerima hadiah atau janji terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi tahun 2020 di Pemerintah Kota Ambon dari AMRI, S.Pd, S.H., M.H. Sprin.Dik/32/DIK.00/01/04/2022 tanggal 21 April 2022. Nota Dinas Nomor 421/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 9 September 2022. Sprin.Juk Nomor 82/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 09 September 2022.

176. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka ANDREW ERIN HEHANUSSA bersama-sama RICHARD LOUHENAPESSY selaku Wali Kota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022, yaitu menerima hadiah atau janji terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi tahun 2020 di Pemerintah Kota Ambon dari AMRI, S.Pd, S.H., M.H. Sprin.Dik/34/DIK.00/01/04/2022 tanggal 21 April 2022. Nota Dinas Nomor 413/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 9 September 2022. Sprin.Juk Nomor 83/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 09 September 2022.
177. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka RICHARD LOUHENAPESSY selaku Wali Kota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022 bersama-sama tersangka ANDREW ERIN HEHANUSSA dan kawan-kawan, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/35/DIK.00/01/04/2022 tanggal 21 April 2022. Nota Dinas Nomor 414/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 9 September 2022. Sprin.Juk Nomor 84/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 09 September 2022.
178. Perkara TPK dalam pengadaan fasilitasi sarana budidaya mendukung pengendalian OPT dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013 atas nama tersangka HASANUDDIN IBRAHIM (Dirjen Holtikultura/KPA). Sprin.Dik-05/01/01/2016. Nota Dinas Nomor 417/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 13 September 2022. Sprin.Juk Nomor 85/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 13 September 2022.
179. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi tahun 2020 di Pemerintah Kota Ambon kepada RICHARD LOUHENAPESSY selaku Wali Kota Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022 bersama-sama ANDREW ERIN HEHANUSSA atas nama tersangka Amri (Kepala Perwakilan Regional Alfa Midi). Sprin.Dik/33/DIK.00/01/04/2022 tanggal 21 April 2022. Nota Dinas Nomor 429/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 16 September 2022. Sprin.Juk Nomor 86/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 16 September 2022.
180. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 atas nama tersangka IRFAN KURNIA SALEH (Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri). Sprin.Dik-44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017. Nota Dinas Nomor 432/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 9 September 2022. Sprin.Juk Nomor : 87/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 20 September 2022.
181. Perkara TPK yaitu Penyelenggara Negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan atau penerimaan-penerimaan lainnya atas nama tersangka Haryadi Suyuti (Walikota Jogjakarta). Sprin.Dik/49/DIK.00/01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 458/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 30 September 2022. Sprin.Juk Nomor 88/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 29 September.
182. Perkara TPK yaitu Penyelenggara Negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan atau penerimaan-penerimaan lainnya atas nama tersangka Nurwidihartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta). Sprin.Dik/50/DIK.00/01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 459/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 30 September 2022. Sprin.Juk Nomor 89/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 29 September 2022.

183. Perkara TPK yaitu Penyelenggara Negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan atau penerimaan-penerimaan lainnya atas nama tersangka Triyanto Budi Yuwono (Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Walikota Jogjakarta). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 460/DIK.02.00/23/09/2022 tanggal 30 September 2022. Sprin.Juk Nomor 90/TUT.01.00/24/09/2022 tanggal 29 September 2022.

Oktober

184. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Toi Solo Kertosono di Kantor Pajak Pratama Pare-Jawa Timur atas nama tersangka Tri Atmoko (Kuasa Wajib Pajak JO CRBC-WIKA-PP). Sprin.Dik/18/DIK.00/01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 463/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 91/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022.

185. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengisian perangkat daerah dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang atas nama tersangka Sugiyanto (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/71/DIK.00/01/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 488/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 92/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

186. Tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengisian perangkat daerah dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang atas nama tersangka Yanuarius Nitbani (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/72/DIK.00/01/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 489/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 93/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

187. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengisian perangkat daerah dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang atas nama tersangka Mohamad Saleh (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/74/DIK.00/01/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 487/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 94/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

188. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengisian perangkat daerah dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang atas nama tersangka Slamet Masduki (Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/73/DIK.00/01/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 490/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 95/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

189. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Lampung Tahun 2022 kepada Prof. Dr. KAROMANI, MSi selaku Rektor Universitas Lampung periode tahun 2019-2022, dan kawan-kawan atas nama tersangka Andi Desfiandi (Wiraswasta). Sprin.Dik/75/DIK.00/01/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 501/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor

96/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

190. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diduga dilakukan oleh Tersangka EDY WAHYUDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan kawan-kawan. Sprin.Dik/68/DIK.00/01/11/2020 tanggal 12 November 2020. Nota Dinas Nomor 503/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 97/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
191. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diduga dilakukan oleh Tersangka HERI SUKAMTO selaku Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Cabang D.I. Yogyakarta dan Kuasa KSO PT Duta Mas Indah - PT Permata Nirwana Nusantara KSO, dan kawan-kawan. Sprin.Dik/69/DIK.00/01/11/2020 tanggal 12 November 2020. Nota Dinas Nomor 504/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 98/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
192. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diduga dilakukan oleh Tersangka SUGIHARTO (Direktur Utama PT. ARSIGRAPHI) selaku Konsultan Perencana dan kawan-kawan. Sprin.Dik/70/DIK.00/01/11/2020 tanggal 12 November 2020. Nota Dinas Nomor 505/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 99/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
193. Perkara TPK berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama-sama dengan DADAN RAMDANI selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Tersangka VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak dan kawan-kawan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016. Sprin.Dik/07/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 508/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 100/TUT.01.02/24/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
194. Perkara TPK berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama-sama dengan DADAN RAMDANI selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Tersangka AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak dan kawan-kawan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017. Sprin.Dik/08/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 507/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 101/TUT.01.02/24/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
195. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu atas nama tersangka Mardani H Maming (Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan Periode 2016-2018). Sprin.Dik/61/DIK.00/01/06/2022 tanggal 16 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 509/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 102/TUT.01.02/24/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

November

196. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait proyek pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama Simon Pampang (Direktur Utama PT Bina Karya Raya). Sprin.Dik/41/DIK.00/01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022. Nota Dinas Nomor 522/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 4 November 2022. Sprin.Juk Nomor 103/TUT.01.00/24/11/2022 tanggal 04 November 2022

197. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait proyek pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama tersangka Jusieandra Pribadi Pampang (Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa). Nota Dinas Nomor 523/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 4 November 2022. Sprin.Juk. Nomor 104/TUT.01.00/24/11/2022 tanggal 04 November 2022.
198. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait proyek pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah atas nama tersangka Marten Toding (Direktur Utama PT Solata Sukses Membangun). Sprin.Dik/43/DIK.00/01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022. Nota Dinas Nomor 524/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 4 November 2022. Sprin.Juk Nomor 105/TUT.01.00/24/11/2022 tanggal 04 November 2022.
199. Perkara TPK berupa penerimaan Gratifikasi dari Kepala SKPD di Lingkungan Pemkot Cimahi dan pemberian hadiah atau janji kepada STEPANUS ROBIN PATTUJU selaku Penyidik KPK terkait pengurusan Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kota Cimahi atas nama tersangka Ajay Muhammad Priatna (Walikota Cimahi periode 2017 s.d. 2022). Sprin.Dik/62/DIK.00/01/07/2022 tanggal 1 Juli 2022. Nota Dinas Nomor 533/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 15 November 2022. Sprin.Juk Nomor 106/TUT.01.00/24/11/2022 tanggal 15 November 2022.
200. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2015 -2018 atas nama tersangka Adib Makarim (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 -2019). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/06/2022 tanggal 7 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 550/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 November 2022. Sprin.Juk Nomor 107/TUT.01.00/24/11/2022 tanggal 30 November 2022.
201. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2015 -2018 atas nama tersangka Agus Budiarto (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 -2019). Sprin.Dik/58/DIK.00/01/06/2022 tanggal 7 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 551/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 November 2022. Sprin.Juk Nomor 108/TUT.01.00/24/11/2022 tanggal 30 November 2022.
202. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 2015 -2018 atas nama tersangka Imam Kambali (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 -2019). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/06/2022 tanggal 7 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 552/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 November 2022. Sprin.Juk Nomor

109/TUT.01.00/24/11/2022 tanggal 30 November 2022.

Desember

203. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Toi Solo Kertosono di Kantor Pajak Pratama Pare-Jawa Timur atas nama tersangka ABDUL RACHMAN (Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Jawa Timur). Sprin.Dik/19/DIK.00/01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 560/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 2 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 110/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 02 Desember 2022.
204. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Toi Solo Kertosono di Kantor Pajak Pratama Pare-Jawa Timur atas nama tersangka SUHERI (Swasta). Sprin.Dik/20/DIK.00/01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 561/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 2 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 111/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 02 Desember 2022.
205. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK tahun anggaran 2017 dan 2018 serta DID tahun anggaran 2018 atas nama tersangka Rifa Surya (Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II, dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan). Sprin.Dik/81/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 565/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 8 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 112/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.
206. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka RIFA SURYA selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Subdirekt orat Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan SUKIMAN selaku Anggota Komisi XI DPR RI peri ode tahun 2014 s.d 2019 dan SUHERLAN terkait Pengurusan Dana Perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 atas nama tersangka Rifa Surya (Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan). Sprin.Dik/86/DIK.00/01/09/2022 tanggal 14 September 2022. Nota Dinas Nomor 564/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 8 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 113/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.
207. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka SUHERLAN bersama-sama dengan SUKIMAN selaku Anggota Komisi XI DPR RI periode tahun 2014 s.d 2019 dan RIFA SURYA terkait dengan Pengurusan Dana Perimbangan unluk Kabupaten Pegunungan Arfak pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 atas nama tersangka Suherlan (Tenaga Ahli DPR dari Fraksi PAN). Sprin.Dik/87/DIK.00/01/09/2022 tanggal 14 September 2022. Nota Dinas Nomor 566/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 8 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 114/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.
208. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengisian perangkat

- daerah dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya atas nama tersangka Mukti Agung Wibowo (Bupati Kabupaten Pematang Jaya Periode 2021-2026). Sprin.Dik/69/DIK.00/01/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 562/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 7 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 115/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.
209. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengisian perangkat daerah dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya atas nama tersangka Adi Jumal Widodo (Komisaris BUMD PT Aneka Usaha). Sprin.Dik/70/DIK.00/01/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 563/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 7 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 116/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.
210. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) atas nama tersangka Gilang Gumilar, Wahid Ikhsan Wahyuddin, Yohanes Binur Haryanto Manik dan Andi Sonny (Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan, Andi Sonny (Kepala perwakilan BPK RI Prov. Sulawesi Selatan)). Sprin.Dik/64/DIK.00/01/07/2022 tanggal 14 Juli 2022. Nota Dinas Nomor 568/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 8 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 117/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.
211. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2014 – 2018 atas nama tersangka Budi Setiawan (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2017-2018). Sprin.Dik/56/DIK.00/01/06/2022 tanggal 7 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 590/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 16 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 118/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.
212. Perkara TPK menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya terkait Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Lampung tahun 2019-2022 atas nama tersangka Heryandi dan Muhammad Bisri (PNS Dosen Universitas Lampung). Sprin.Dik/77/DIK.00/01/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 587/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 16 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 119/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.
213. Perkara TPK menerima suap dan gratifikasi terkait Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Lampung tahun 2019-2022 atas nama tersangka Karomani (Rektor Universitas Lampung periode tahun 2019-2022). Sprin.Dik/76/DIK.00/01/08/2022 tanggal 20 Agustus 2022. Nota Dinas Nomor 586/DIK.02.00/23/12/2022 tanggal 16 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 120/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.
214. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 atas nama tersangka Sudarso (General Manager PT Adimulya Agro Lestari). Sprin.Dik/104/DIK.00/01/09/2022 tanggal 30 September 2022. Nota Dinas Nomor 613/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 121/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 23 Desember 2022.
215. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 atas

nama tersangka Frank Wijaya (Wiraswasta). Sprin.Dik/105/DIK.00/01/09/2022 tanggal 30 September 2022. Nota Dinas Nomor 614/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 122/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 23 Desember 2022.

216. Perkara TPK secara bersama-sama setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terkait dengan Jasa Konsultasi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil & Gas pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 dan penerimaan lainnya atas nama tersangka BUDI TJAHHJONO alias BUDI TJAHYONO (Kepala Divisi Asuransi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan/atau Direktur Pemasaran Korporasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan/atau selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Sprin.Dik/62/DIK.00/01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 618/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 26 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 123/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.
217. Perkara TPK secara bersama-sama setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terkait dengan Jasa Konsultasi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil & Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka SOLIHAN (Direktur Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008-2016). Sprin.Dik/63/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 619/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 26 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 124/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.
218. Perkara TPK secara bersama-sama gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terkait dengan Jasa Konsultasi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil & Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 dan penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka KI AGUS EMIL FAHMY CORNAIN (pemilik PT. AYODYA MULTI SARANA – Swasta). Sprin.Dik/64/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 620/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 26 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 125/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.
219. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka BUDI TJAHHJONO alias BUDI TJAHYONO (Dirut PT. Jasindo). Sprin.Dik/78/DIK.00/01/12/2020, tanggal 3 Desember 2020. Nota Dinas Nomor 621/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 26 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 126/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.
220. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Tersangka H. ABDUL LATIF (Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021) dkk. Sprin.Dik-07/DIK.00/01/01/2018 Tanggal 12 Januari 2018. Nota Dinas Nomor 616/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 26 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 127/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.
221. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

- berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. H. ABDUL LATIF (Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021). Sprin.Dik-08/ DIK.00/01/01/2018 Tanggal 12 Januari 2018. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 26 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 127/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.
222. Perkara TPK Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua atas nama tersangka ELTINUS OMALENG (Bupati Mimika periode 2014-2019) bersama-sama dengan tersangka MARTHEN SAWY (PPK) Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2020 tanggal 30 September 2020. Nota Dinas Nomor 626/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 129/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 29 Desember 2022
223. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Theodorus Yosep Parera (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/94/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 622/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 130/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 29 Desember 2022.
224. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Eko Suparno (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/95/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 623/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 131/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 29 Desember 2022.
225. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak, atas nama tersangka ANGIN PRAYITNO AJI (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/107/DIK.00/01/12/2021, tanggal 29 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 629/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 133/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.
226. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka VICTOR SITORUS (Swasta - Kontraktor). Sprin.Dik/19/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 627/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 134/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tahun 2022 adalah sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) perkara yaitu:

Januari

1. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa HADINOTO SOEDIGNO selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2007-2012 yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International Pte.